

**Judul** : Revisi UU Hak Cipta Kerancuan Regulasi Timbulkan Konflik  
**Tanggal** : Rabu, 12 November 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Revisi UU Hak Cipta Kerancuan Regulasi Timbulkan Konflik



Yanuar Arif Wibowo

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Yanuar Arif Wibowo menegaskan perlunya revisi komprehensif UU Hak Cipta. Hal ini demi kepastian hukum, memperjelas tata kelola royalti, dan memastikan ekosistem musik nasional tumbuh secara adil.

Saat ini, ada kekosongan regulasi dan ketidakjelasan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kekosongan dan ketidakjelasan tersebut justru memunculkan konflik. Situasi ini tidak hanya terjadi antara pencipta lagu dengan penyanyi, tapi juga dengan pelaku industri, hingga UMKM yang memutar musik di ruang publik.

Selama ini, sambungnya, orang bertanya kepada siapa mereka harus membayar royalti. Pasalnya, para penyanyi merasa tidak diuntungkan, begitu juga dengan pencipta dan industri. "Lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan? Karena itu regulasi ini harus kita rapikan," ujar Yanuar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dia juga menekankan, sebagai negara berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem hak cipta di negara lain. Penegakan hukum yang berlebihan justru kontraproduktif, terutama terhadap UMKM. "Aturannya harus

jauh dari unsur pidana. Kita tidak ingin UMKM yang cuma memutar musik malah disomasi dan dipidanakan," tegasnya.

Yanuar mengkritik keras masih adanya somasi terhadap pelaku usaha. Padahal Baleg, Pemerintah, dan aparat penegak hukum telah sepakat melakukan moratorium selama proses revisi berjalan. "Tolong aparat tidak melanjutkan proses. Kita moratorium kok, sampai revisi undang-undang ini selesai," ungkapnya.

Terkait mekanisme distribusi royalti, Yanuar menyoroti persoalan lambatnya pembayaran kepada pencipta sebagaimana disampaikan pelaku industri. Negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri urusan teknis industri, namun tetap wajib memastikan perlindungan terhadap semua pihak.

"Biarkan hubungan pencipta, penyanyi, dan industri diatur lebih teknis pada peraturan turunannya. UU harus memastikan perlindungan yang adil untuk semua," tuturnya.

Selanjutnya, dia juga mengingatkan komitmen Baleg untuk menyempurnakan RUU Hak Cipta. Sehingga industri musik nasional bisa tumbuh sehat, ekosistem kreatif berjalan transparan, dan seluruh pemangku kepentingan mendapatkan hak yang layak tanpa ketakutan kriminalisasi.

"Semua anak bangsa harus bisa menikmati musik dengan tenang. Yang memutar tenang, yang mencipta tenang, dan yang menikmati juga tenang," katanya.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menambahkan, mendaikkan hubungan antara pencipta lagu dan penyanyi dalam pembahasan RUU Hak Cipta jadi hal yang cukup krusial. Pasalnya, berbagai perselisihan yang kerap terjadi di industri musik selama ini disebabkan lemahnya payung hukum. ■ PYB